

Peran Abdul Haris Nasution dalam Penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (1958-1961)

Muhammad Naufal Asyraf¹ Eko Ribawati² Muhammad Anggie Farizqi Prasadana³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: asyrafnaufal64@gmail.com¹ eko.ribawati@untirta.ac.id² anggie.farizqi@untirta.ac.id³

Abstrak

Pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 menjadi ancaman disintegrasi serius akibat ketimpangan pusat-daerah dan polarisasi militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang PRRI, dinamika kehidupan Mayor Jenderal A.H. Nasution, serta peran kepemimpinannya selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam merancang operasi penumpasan periode 1958–1961. Metode penelitian menggunakan metode sejarah (historis) melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan autobiografi Nasution serta arsip surat kabar Belanda sezaman. Hasil penelitian membuktikan Mayor Jenderal A.H. Nasution berperan krusial menyelamatkan NKRI. Ia berhasil mengonsolidasi internal militer dan menginisiasi operasi gabungan antarmatra, seperti Operasi Tegas dan Operasi 17 Agustus. Nasution juga memadukan tindakan koersif dengan strategi rekonsiliasi politik melalui pemberian amnesti-abolisi bagi mantan pengikut PRRI. Keberhasilan operasi ini meredam pergolakan pada 1961 serta meletakkan dasar konsep Perang Rakyat Semesta.

Kata Kunci: Abdul Haris Nasution, PRRI, Sejarah Militer

Abstract

The Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) upheaval on February 15 1958 posed a serious threat of national disintegration driven by center-region disparities and military polarization. This study aims to analyze the background of the PRRI, the life of Major General A.H. Nasution, and his leadership role as Army Chief of Staff in devising suppression operations between 1958 until 1961. The research employs the historical method—comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—utilizing Nasution's autobiography and contemporary Dutch newspaper archives. The findings demonstrate that Major General A.H. Nasution played a crucial role in safeguarding the Unitary State of the Republic of Indonesia. He successfully consolidated the military internally and initiated joint inter-service operations, such as Operation Tegas and Operation 17 Agustus. Nasution also combined coercive measures with a strategy of political reconciliation by granting amnesty and abolition to former PRRI followers. The success of these operations quelled the upheaval by 1961 and laid the foundation for the concept of Total People's War.

Keywords: Abdul Haris Nasution, PRRI, Military History



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dekade awal pasca kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun stabilitas politik dan menjaga keutuhan wilayah negara. Sebagai negara yang baru merdeka dengan wilayah yang luas serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan internal yang berpotensi mengancam persatuan nasional. Salah satu permasalahan paling krusial pada dekade 1950-an adalah munculnya konflik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di wilayah luar Jawa. Ketegangan pusat dan daerah tersebut dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan pembangunan, ketidakpuasan terhadap distribusi keuangan negara, keterbatasan peran elite daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, serta masih lemahnya

integrasi nasional. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam, terutama di Sumatera, merasa kontribusi ekonomi mereka tidak diimbangi dengan perhatian dan pembangunan yang adil dari pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya stabilitas politik nasional akibat seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Kabinet yang selalu sering berganti menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara efektif dan menyebabkan turunnya tingkat kepuasan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat. Stabilitas politik nasional pun semakin bergejolak dengan pecahnya dwitunggal Soekarno-Hatta. Pada 1 Desember 1956 Mohammad Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai wakil presiden. Alasan yang dikemukakan antara lain ia sudah merasa tidak cocok dengan kebijaksanaan politik Soekarno yang cenderung memonopoli kekuasaan (Rachmat et al, 1992: 7). Rakyat Indonesia sebenarnya tetap mendukung dan menghendaki Soekarno-Hatta sebagai pemimpin sekaligus penyalur semangat rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Rachmat et al, 1992: 7).

Menurut Lubis (Dalam Rachmat et al, 1992: 8) menjelang pertengahan Februari 1956 tersiar berita bahwa Hatta berniat mengundurkan diri secara resmi sebagai wakil presiden setelah dewan perwakilan baru tersusun. Munculnya perbedaan Soekarno dan Hatta baik dari segi latar belakang atau prinsip akhirnya menyebabkan terjadinya keretakan dan ketegangan antar keduanya. Perbedaan terbesar antara Soekarno dan Hatta terletak pada sifat Soekarno yang bermain api dengan Komunis, sedangkan Hatta adalah seorang yang cukup anti dengan Komunis. Keduanya memang Islam dan Nasionalis, namun Soekarno lebih condong ke Marxis, sedangkan Hatta condong ke Sosialis. Situasi di pusat pemerintahan ini dipandang sangat menghambat kepentingan daerah, gejolak-gejolak yang terjadi mengakibatkan merosotnya keadaan luar Jawa, padahal sumber-sumber pendapatan negara ada di luar pulau Jawa (Rachmat et al, 1992: 40). Selain itu, hasil Pemilu 1955 menunjukkan pula bagi sebagian pemimpin di daerah akan adanya bahaya yang lebih besar bagi keutuhan negara. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah menikam bangsanya sendiri pada 1948, secara mengejutkan berhasil menjadi empat besar dalam perolehan suara, bersama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu diterapkannya kebijaksanaan rasionalisasi dan rekonstruksi di bidang ketentaraan, menimbulkan berbagai masalah politik yang cukup gawat, seperti Divisi banteng yang diciutkan menjadi satu brigade dengan lima batalyon kesatuannya yang terbesar ada di Riau dan Sumatera Barat (Rachmat et al, 1992: 41).

Berdasar situasi-situasi tersebut, pada akhirnya muncul gerakan-gerakan daerah yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah pusat, baik dalam bentuk tuntutan otonomi yang lebih luas maupun perlawanan bersenjata. Salah satu gerakan yang paling serius dan berpengaruh adalah pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan pada 15 Februari 1958 di Padang. PRRI dipimpin oleh tokoh-tokoh sipil dan militer, seperti Sjafruddin Prawiranegara, Letnan kolonel Ahmad Husein, dan Kolonel Maludin Simbolon, yang secara terbuka menantang legitimasi pemerintah pusat Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bukan hanya sekedar pemberontakan lokal, melainkan gerakan politik dan militer yang secara langsung mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini menguasai wilayah strategis di Sumatera dan berpotensi mendorong fragmentasi nasional apabila tidak segera ditangani. Selain itu, dalam konteks dunia internasional yang sedang mengalami Perang Dingin, pemberontakan PRRI juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap kemungkinan campur tangan kekuatan asing yang dapat memperburuk stabilitas nasional. Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah pusat tidak hanya menggunakan upaya persuasif diplomatis untuk meredakan ketegangan, tetapi juga mengambil langkah tegas dengan

mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas PRRI. Salah satu tokoh kunci dalam upaya penumpasan PRRI adalah Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution, Abdul Haris Nasution dikenal sebagai salah satu pemikir militer berpengaruh di Indonesia yang mempunyai gagasan-gagasan strategis mengenai perang dan konsep pertahanan negara. Dalam konteks penumpasan PRRI, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan ketua gabungan kepala staf, memegang peranan yang sangat penting.

Sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat dan koordinator pasukan dari ketiga angkatan perang, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis, mengoordinasikan operasi militer, serta memastikan kesatuan komando dalam menghadapi pemberontakan PRRI. Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution juga memberikan reaksi keras pada pembentukan PRRI, dalam ceramahnya di hadapan 970 orang perwira dari ketiga angkatan perang pada 22 Februari 1958, beliau menyatakan bahwa siapa saja yang mendukung dan menyetujui tindakan golongan PRRI dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari dinas ketentaraan (Rachmat et al, 1992: 96). Peran Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution dalam penumpasan PRRI tidak hanya terbatas pada aspek militer semata, tetapi juga mencakup dimensi politik dan teritorial. Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution dikenal sebagai tokoh militer yang memiliki pemikiran strategis mengenai pertahanan negara, khususnya melalui konsep pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam menumpas PRRI, beliau menerapkan strategi terpadu yang mengombinasikan operasi militer, pendekatan teritorial, serta upaya politik dan psikologis untuk melemahkan dukungan terhadap pemerintahan tandingan tersebut.

Operasi-operasi militer yang dilaksanakan di Sumatera pada periode 1958–1961 seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, serta Operasi Saptamarga, menunjukkan peran vital Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan ketua gabungan kepala staf. Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution memainkan peran penting sebagai perencana strategi dan pengendali operasi tingkat pusat, Kecakapan Nasution dalam menjalankan tugas tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan penumpasan PRRI. Keberhasilan penumpasan PRRI pada akhirnya tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga memperkuat posisi pemerintah pusat dan menegaskan peran militer sebagai penjaga stabilitas nasional. Peristiwa ini juga memperkuat posisi Angkatan Darat dalam kancah perpolitikan nasional saat itu, hal itu terwujud dalam bentuk dwifungsi ABRI, sebuah gagasan mengenai peran ganda militer dalam bidang pertahanan dan sosial-politik, konsep ini dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution itu sendiri. Peristiwa penumpasan PRRI juga memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan politik dan militer Indonesia. Pasca penumpasan PRRI, Indonesia mengalami masa transisi politik dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin, selain itu, Keberhasilan Angkatan Darat dalam menghadapi PRRI turut memperkuat pengaruh militer dalam kehidupan politik nasional pada masa berikutnya. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Abdul Haris Nasution dalam penumpasan PRRI menjadi penting tidak hanya untuk memahami sejarah konflik pusat dan daerah, tetapi juga untuk melihat dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam “Peran Abdul Haris Nasution dalam penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958– 1961”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kepemimpinan Abdul Haris Nasution, strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI dan perkembangan sejarah militer Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran pada suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan

masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu oleh persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang pada akhirnya dapat menjadi suatu kesimpulan (Syafriada Hanif Munir, 2021: 1). Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan prosedur sistematis untuk mengkaji dan merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Menurut Gilbert J. Garraghan (1957: 33) metode sejarah adalah seperangkat prinsip dan aturan sistematis yang dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975: 32). Menurut Ismaun (2005) metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik. Heuristik merupakan proses yang pertama kali dilakukan oleh seorang peneliti sejarah ketika akan melakukan penelitian, dimana pada proses ini peneliti akan melakukan penelusuran sumber-sumber sejarah. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukanlah suatu ilmu yang karenanya tidak memiliki peraturan-peraturan umum, akan tetapi lebih pada keterampilan dalam menemukan catatan-catatan (Abdurrahman, 2011: 101). Pada penelitian ini, sumber yang dipakai oleh penulis merupakan sumber tertulis berupa buku, jurnal, artikel, dan arsip yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Adapun sumber primer dan sumber sekunder yang dipakai peneliti sebagai berikut:

a. Sumber Primer:

- 1) Buku Autobiografi karya Abdul Haris Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1: Kenangan masa muda.
- 2) Buku Autobiografi karya Abdul Haris Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 2: Kenangan masa gerilya.
- 3) Buku Autobiografi karya Abdul Haris Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 3: Masa pancaroba Pertama.
- 4) Buku Autobiografi karya Abdul Haris Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 4: Masa pancaroba Kedua.
- 5) Buku Autobiografi karya Abdul Haris Nasution berjudul Memenuhi Panggilan Tugas jilid 5: Kenangan masa Orde Lama.
- 6) Surat kabar Belanda Java-Bode terbitan 05 November 1957 pada halaman kedua terdapat judul berita "*Chef-staf Deze Week Opnieuw Naar Medan*".
- 7) Surat kabar Belanda New Haarleem terbitan 08 April 1958, pada halaman keempat terdapat judul berita "*ALS GEVOLG VAN OFFENSIVE VAN DE TROEPEN VAN NASUTION Tegenregering in hachelijke positie Ontruiming van Bukittinggi wordt voorbereid*".
- 8) Surat kabar Belanda De Tijd terbitan 31 Maret 1958, pada halaman pertama terdapat judul berita "*De opstandelingen bereiden zich voor opeen guerilla Nasution zou staatsgreep voorbereiden en zelf president willen worden*".

b. Sumber Sekunder:

- 1) Buku biografi Abdul Haris Nasution yang ditulis oleh sejarawan Agus Salim berjudul *Ensiklopedi Tokoh Nasional: A.H, Nasution*.
- 2) Buku karya Sustriminingsih dengan judul *Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI dan Permesta*.
- 3) Buku yang ditulis Bert Supit dengan judul *Apa beda Permesta dan PRRI*
- 4) Buku yang ditulis Redy Rachmat, dkk yang berjudul *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: kasus PRRI*.

2. Kritik. Setelah melalui tahapan pengumpulan sumber atau heuristik, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kritik. Kritik dalam konteks metode sejarah disebut juga verifikasi, kritik memiliki tujuan untuk mengklasifikasi dan memverifikasi sumber-sumber sejarah yang didapatkan oleh peneliti. Menurut Kuntowijoyo (2012) kritik terbagi dalam dua konsep, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal disebut juga kritik substansi, karena menelusuri hal-hal yang bersifat dalam dari suatu sumber sejarah yang digunakan, sedangkan kritik eksternal disebut sebagai kritik luaran dari sumber sejarah yang didapatkan melalui heuristik.
- a. Kritik Eksternal. Kritik eksternal merupakan suatu proses pengkajian untuk meneliti keaslian dari suatu sumber sejarah. Jika sumber sejarahnya berupa tulisan, maka peneliti akan melakukan validasi terkait latar belakang penulis, dan kapan tulisannya itu dibuat, sedangkan jika sumbernya berupa sumber lisan maka peneliti akan melakukan validasi dengan menelusuri hubungan antara narasumber dengan peristiwa sejarah. Kritik eksternal lebih memfokuskan kepada aspek luaran dari suatu sumber sejarah. Kritik eksternal yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
- 1) Sumber Primer. Berdasarkan sumber-sumber yang sudah dikumpulkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa sumber primer yang didapat adalah beberapa buku autobiografi yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution. Buku-buku ini berjudul:
 - a) *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1: Kenangan Masa Muda*,
 - b) *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya. Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3: Masa Pancaroba Pertama*.
 - c) *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua*.
 - d) *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5. Kenangan Masa Orde Lama*. Buku-buku tersebut masih memiliki tampilan fisik yang cukup baik, dan tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penulis juga mendapatkan sumber-sumber berupa arsip surat kabar dari media Belanda dan media lokal, serta dokumentasi foto peristiwa sejarah.
 - 2) Sumber Sekunder Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah Buku biografi Abdul Haris Nasution yang ditulis oleh sejarawan Agus Salim berjudul *Ensiklopedi Tokoh Nasional: A.H, Nasution*. Penulis juga memakai buku berjudul *Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI dan Permesta* karya Sustriminingsih yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah TNI. Kemudian, ada buku dengan judul *Apa beda PRRI dan Permesta* yang ditulis oleh Bert Supit, dan diterbitkan Lembaga Kajian Sejarah Indonesia. Terakhir, ada buku berjudul *Tantangan dan Rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*.
- b. Kritik Internal. Kritik internal dilakukan untuk mengetahui isi sumber sejarah, atau tingkat kevalidan informasinya. Kritik internal dilakukan setelah sumber sejarah dinyatakan valid sebagai sumber sejarah yang asli.
- 1) Sumber Primer:
 - a) Buku *Memenuhi Panggilan Jilid 1: Kenangan Masa Muda*, berisikan latar belakang kehidupan Abdul Haris Nasution dari masih kecil, remaja, hingga menginjak dewasa dan memulai karir sebagai anggota militer.
 - b) Buku *Memenuhi Panggilan Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya*, buku ini memuat kenangan Abdul Haris Nasution dalam masa gerilya saat menghadapi Agresi Militer Belanda.
 - c) Buku *Memenuhi Panggilan Jilid 3: Masa Pancatoba Pertama*, buku ini berisikan perjalanan karir Abdul Haris Nasution yang mulai mencapai puncaknya, buku ini

- juga berisi ketegangan antara petinggi Angkatan Darat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dan juga buku ini memuat konflik di berbagai daerah (DPRS).
- d) Buku Memenuhi Panggilan Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua, buku ini masih melanjutkan isi dari jilid sebelumnya, dimana pada buku ini juga membahas mengenai keterlibatan Abdul Haris Nasution dalam peristiwa penting, seperti penumpasan PRRI, pembebasan Irian Barat, dan mencetuskan dwifungsi ABRI.
 - e) Buku Memenuhi Panggilan Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama, buku ini berisikan kenangan panjang Abdul Haris Nasution selama masa pemerintahan Orde Lama.
- 2) Sumber Sekunder: Buku Ensiklopedi Tokoh Nasional: A.H. Nasution yang berisikan biografi lengkap dari Abdul Haris Nasution. Kemudian, buku berjudul Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI dan Permesta yang berisikan sejarah lengkap dari PRRI dan Permesta, serta upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah. Buku Apa beda PRRI dan Permesta, tidak hanya memuat peristiwa PRRI dan permesta secara utuh, tapi juga menjelaskan perbedaan kedua gerakan ini secara lengkap. Terakhir, ada buku Tantangan dan Rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan Bangsa: Kasus PRRI, buku ini berisikan kronologis utuh bagaimana terjadinya peristiwa PRRI.
3. Interpretasi. Interpretasi adalah tahapan ketiga dalam metode sejarah, interpretasi dilakukan setelah proses heuristik dan kritik berhasil terpenuhi. Menurut Kuntowijoyo (2005), sejarawan melakukan interpretasi dengan berhadapan pada sumber sejarah yang terbatas, kemudian bersikeras mengimajinasikan sumber sejarah. Interpretasi dibagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis, analisis berarti menguraikan data-data yang diperoleh, sedangkan sintesis berarti mengelompokkan data menjadi satu.
4. Historiografi. Historiografi merupakan tahap paling akhir dalam metode sejarah. Dalam penulisan historiografi, sejarawan harus memiliki kemampuan mengarang dan menulis yang baik, karena hasil dari historiografi diharapkan dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah secara nyata dan akurat. Untuk mencapai hal itu maka historiografi tidak bisa berdiri sendiri, historiografi memerlukan sumber-sumber yang kredibel dan penafsiran yang objektif.

Peneliti merekonstruksi dan mendeskripsikan peristiwa sejarah dari fakta-fakta yang didapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Mulai dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, hingga tahap ini. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari metode penelitian sejarah setelah sumber-sumber sejarah ditemukan, dianalisis, dan ditafsirkan yang utuh mengenai Peran Abdul Haris Nasution dalam Penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (1958-1961).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Kondisi Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Pada dekade 1950-an

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun stabilitas politik dan menjaga keutuhan wilayah negara. Sebagai negara yang masih berusia sangat muda dengan wilayah yang luas serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan internal yang berpotensi mengancam persatuan nasional. Salah satu permasalahan paling mengkhawatirkan pada dekade 1950-an adalah munculnya konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di wilayah luar Jawa. Ketegangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut diakibatkan oleh berbagai macam permasalahan, antara lain ketimpangan pembangunan, ketidakpuasan terhadap distribusi keuangan negara, keterbatasan peran elite daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, serta masih lemahnya

integrasi nasional. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam, terutama di Sumatera, merasa kontribusi ekonomi mereka tidak diimbangi dengan perhatian dan pembangunan yang adil dari pemerintah pusat (Rachmat et al, 1992). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya stabilitas politik nasional akibat seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal, total ada tujuh Kabinet yang secara bergantian memegang tampuk kekuasaan, seperti Kabinet Natsir yang berkuasa pada September 1950 hingga Maret 1951, kemudian Kabinet Sukiman dari April 1951 hingga April 1952, Kabinet Wilopo dari April 1952 hingga Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo dari Juli 1953 hingga 20 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 hingga Maret 1956, Kabinet Ali Sastroadmidjojo II dari Maret 1956 hingga Maret 1957, dan kabinet terakhir pada masa ini yaitu Kabinet Djuanda atau dikenal sebagai Zaken Kabinet yang berkuasa dari April 1957 hingga Juli 1959. Kabinet yang selalu sering berganti dengan sangat cepat, menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara efektif dan menyebabkan turunnya tingkat kepuasan masyarakat di daerah terhadap pemerintah pusat (Rachmat et al, 1992: 5).

Stabilitas politik nasional pun semakin bergejolak dengan pecahnya dwitunggal Soekarno-Hatta. Pada 1 Desember 1956 Mohammad Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai wakil presiden. Alasan yang dikemukakan antara lain ia sudah merasa tidak cocok dengan kebijaksanaan politik Soekarno yang cenderung memonopoli kekuasaan (Rachmat et al, 1992: 7). Pengunduran diri Hatta merupakan simbol runtuhnya kesatuan dwitunggal Soekarno-Hatta yang selama ini menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan representasi keseimbangan geopolitik, 21 dimana Soekarno merepresentasikan Jawa-nasionalis, sedangkan Hatta merepresentasikan luar Jawa-Islam-konstitusionalis. Retaknya hubungan kedua proklamator ini disebabkan oleh perbedaan prinsipil yang sangat tajam mengenai arah demokrasi Indonesia, Soekarno menghendaki pembubaran partai-partai dan penerapan Demokrasi Terpimpin, sementara Hatta tetap teguh mempertahankan jalur demokrasi konstitusional-parlementer dan otonomi daerah yang luas. Mundurnya Hatta juga membuat daerah-daerah di luar Jawa merasa kehilangan pelindung dan representasi politik utama mereka di tingkat pusat. Perasaan teralienasi ini mempercepat radikalisasi gerakan daerah (Rachmat et al, 1992).

Permasalahan Ekonomi dan Sentralisme Pemerintah Pusat

Selain permasalahan politik nasional, faktor permasalahan ekonomi dan sentralisme pemerintah pusat turut menjadi pemicu dari meletusnya pergolakan PRRI, hal ini terletak pada ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan alokasi anggaran antara pemerintah pusat di Jakarta dengan daerah-daerah produsen di luar Jawa. Selama periode Demokrasi Liberal, pemerintah pusat menerapkan sistem tata ekonomi yang sangat sentralistik. Semua kebijakan moneter, perizinan ekspor-impor, dan alokasi anggaran pembangunan dikendalikan penuh oleh Jakarta (Dayani et al, 2025) Menurut Rinardi (2025) Kondisi ini memicu lahirnya istilah "eksploitasi kolonial baru" versi domestik, di mana daerah merasa diperas demi membiayai kebutuhan konsumtif dan proyek-proyek politik di Pulau Jawa. Berdasarkan data ekonomi makro pada pertengahan tahun 1950-an, daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama Sumatera dan Sulawesi yang merupakan penyumbang terbesar devisa negara melalui komoditas ekspor seperti karet, minyak bumi, dan kopi. Sumatera sendiri memberikan kontribusi hingga lebih dari 70 persen dari total nilai ekspor nasional. Namun, ironisnya, persentase pengembalian anggaran dari pemerintah pusat ke daerah-daerah penghasil tersebut sangatlah minim dan tidak sebanding dengan sumbangan devisa yang mereka berikan.

Dinamika Internal Angkatan Darat dan Terbentuknya Dewan- Dewan di Daerah

Pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tidak dapat dipisahkan dari konflik internal yang melanda tubuh Angkatan Darat pasca peristiwa 17 Oktober 1952. Polarisasi di kalangan perwira militer terjadi antara kelompok perwira Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) di Jakarta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution dengan kelompok perwira di daerah yang memiliki kedekatan emosional mendalam dengan anak buah dan rakyat di teritori masing-masing. Kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi (RERA) tentara yang dijalankan oleh pusat dipandang oleh para komandan di daerah sebagai upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh politik dan militer para perwira pejuang daerah. Ketidakpuasan para perwira menengah di daerah ini kemudian bermanifestasi dalam pembentukan dewan-dewan daerah yang dipimpin oleh para komandan militer setempat, di antaranya: 1. Dewan Banteng, dibentuk di Sumatera Tengah (Bukittinggi dan Padang) pada tanggal 20 Desember 1956, dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4). 2. Dewan Gajah, dibentuk di Sumatera Utara (Medan) pada tanggal 22 Desember 1956, dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon (Panglima TT I Bukit Barisan). 3. Dewan Garuda, dibentuk di Sumatera Selatan pada Januari 1957, dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Pembentukan dewan-dewan ini diawali oleh pertemuan pertemuan reuni eks-divisi militer pejuang, seperti Reuni ke-I Eks Divisi Banteng di Padang. Dewan-dewan daerah tersebut secara de facto mengambil alih kekuasaan administratif dan pemerintahan dari tangan gubernur atau kepala daerah yang ditunjuk oleh Jakarta. Sebagai contoh, Letkol Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo dengan alasan bahwa sang gubernur gagal memperjuangkan hak hak otonomi dan akselerasi pembangunan daerah. Pengalihan kekuasaan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemuka adat, alim ulama, pamong praja, dan elemen kepolisian setempat karena dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memotong rantai birokrasi sentralistik Jakarta yang korup dan lamban.

Terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Sebagai upaya terakhir untuk meredakan ketegangan yang semakin meruncing, pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada September 1957 yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada November 1957 di Jakarta. Dalam Munas tersebut, sempat tercapai formula kesepakatan moral untuk mengembalikan Dwi-Tunggal dan 24 memberikan otonomi daerah yang riil. Namun, harapan akan resolusi damai tersebut sirna seketika setelah terjadinya Peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957, yaitu upaya pembunuhan berupa pelemparan granat terhadap Presiden Sukarno di Perguruan Cikini. Pemerintah pusat menuduh kelompok oposisi kanan dan perwira daerah, termasuk Kolonel Zulkifli Lubis, sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Akibatnya, situasi politik nasional berubah drastis menjadi sangat radikal. Hasil-hasil akomodatif dari Munas dan Munap dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memperketat pengawasan militer, melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh oposisi, dan menutup ruang negosiasi. Hal ini memaksa sejumlah tokoh politik sipil nasional terkemuka seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo untuk melarikan diri dari Jakarta menuju Sumatra Tengah guna mencari perlindungan politik (Nasution, 1984).

Pada tanggal 15 Februari 1958, bertempat di Gedung Jendral, Padang, Letnan Kolonel Ahmad Husein secara resmi memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam proklamasi tersebut, ditunjuklah Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri PRRI merangkap Menteri Keuangan, beserta jajaran kabinetnya yang diisi oleh tokoh-tokoh berkaliber nasional. Gerakan ini ditegaskan oleh para tokohnya bukan

bertujuan untuk mendirikan negara baru atau memisahkan diri dari Republik Indonesia, melainkan sebuah pemerintahan tandingan yang sah demi menyelamatkan keutuhan negara dari penyimpangan konstitusi 26 yang dilakukan oleh rezim Sukarno di Jakarta. Dengan proklamasi ini, konfrontasi politik resmi berubah menjadi perang saudara yang sangat membekas dalam sejarah modern Indonesia.

Latar Belakang Kehidupan Abdul Haris Nasution

Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam lembaran sejarah modern Indonesia. Perannya yang masif dalam kancah perjuangan kemerdekaan, peletakan batu pertama birokrasi modern Angkatan Darat, pemikiran konsep taktis perang gerilya, hingga andilnya yang krusial dalam menumpas berbagai pergolakan serta pemberontakan di daerah menjadikannya sebuah figur sentral yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika perjalanan politik-militer bangsa Indonesia pada abad ke-20. Pemikiran-pemikiran taktisnya mengenai pertahanan nasional tidak hanya diakui di dalam negeri, melainkan juga diadopsi secara internasional sebagai salah satu doktrin perang teritorial terbaik. Untuk memahami secara utuh integritas, keteguhan prinsip, serta ketajaman visi militer dan politik Nasution dalam menghadapi berbagai pergolakan yang ada, khususnya ketika ia mengomandoi penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958–1961, maka diperlukan sebuah penelusuran biografis mengenai latar belakang kehidupannya sejak masa kanak-kanak hingga fase kematangan intelektual dan militernya di masa dewasa.

Masa Kanak-kanak dan Pendidikan

Abdul Haris Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di desa Hutapungkut, Distrik Mandailing, Kotanopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berbatasan dengan Sumatera Barat, tempat yang jauh dari kota atau pusat keramaian. Ayah Nasution bernama Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Zaharah Lubis. Nasution merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara, dan anak laki-laki pertama dalam keluarganya. Nama Nasution di belakang nama Abdul Haris mengikuti nama ayahnya, yang mengikuti tradisi suku Batak. Sebagai anak laki-laki, Nasution akan meneruskan Marga Nasution tersebut dan silsilah keluarga. Begitulah adat orang Mandailing (Nasution, 1981: 1). Ketika akan bersekolah, terjadi konflik kecil di lingkungan keluarganya, ayahnya berkeinginan setelah menyelesaikan sekolah dasar, Nasution harus melanjutkan ke sekolah agama agar dia menjadi kyai seperti yang ayahnya inginkan, tetapi tidak dengan keinginan ibunya, Nasution harus melanjutkan ke sekolah umum yang didirikan oleh Belanda agar Nasution kelak menjadi dokter, bahkan keinginan kakeknya Nasution harus sekolah setingkat beladiri menjadi seorang pendekar silat, meneruskan jejaknya. Akhirnya pada saat Nasution memasuki usia sekolah, orang tuanya menyekolahkan anaknya ke sekolah Belanda. Walaupun pada masa itu pemerintah Belanda melakukan penyaringan secara ketat bagi anak-anak pribumi untuk diperbolehkan mengikuti pendidikan di sekolah Belanda. Tetapi Nasution salah satu murid pribumi yang lolos dan diperbolehkan sekolah di sekolah Belanda. Nasution mulai memasuki bangku pendidikan dasar HIS (Hollandse Inlandse School) atau setara dengan Sekolah Dasar (SD) di Kotanopan, yang kira-kira berjarak 6 km dari kampung Hutapungkut. Pada masa itu, pemuda-pemuda yang menamatkan sekolah HIS dianggap sebagai orang terpelajar (Nasution, 1981).

Nasution menamatkan pendidikannya di HIS pada Tahun 1932,, kemudian ia diterima menjadi siswa HIK (Hollandsch Inlandsch Kweekschool) yaitu sekolah guru yang terletak di Bukittinggi. Nasution dan keluarga merasa sangat bangga karena hanya satu siswa saja dari tiap sekolah rendah di Sumatera dan Kalimantan yang terpilih untuk sekolah di sekolah guru ini. Di Bukittinggi Nasution tinggal di asrama selama tiga tahun. Seperti saat Nasution masih

menduduki bangku Sekolah Dasar yang 29 selalu mendapatkan peringkat baik, di Sekolah Guru Nasution pun selalu mendapatkan peringkat 5 besar di kelas. Saat bersekolah di HIK, terjadi perubahan besar dalam cara hidup Nasution, tidak lagi mandi di sungai bersama teman-teman semasa kecilnya tapi dalam kamar mandi. Dari tidak beralaskan kaki, menjadi bersepatu, makan dengan sendok dan garpu, dan hidup dalam disiplin asrama. Guru guru di HIK adalah orang Belanda, kecuali guru seni rupa dan bahasa Melayu.

Peran Abdul Haris Nasution dalam Penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Posisi dan kebijakan Abdul Haris Nasution

Menurut Nasution (1984) setelah Letnan Kolonel Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum keras untuk pemerintah pusat pada 10 Februari 1958 yang berbunyi: 1. Menuntut agar Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dalam waktu 5 x 24 jam. 2. Meminta kepada Presiden Soekarno untuk menunjuk Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX guna membentuk Zaken Kabinet (kabinet ahli) yang bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan (komunisme). 3. Menuntut Presiden Sukarno untuk kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional sesuai dengan ketentuan UUDS 1950. Pemerintah pusat sangat berang pada tingkah perwira-perwira daerah tersebut. Nasution selaku KSAD juga memberikan reaksi yang sangat keras, pada 11 Februari 1958 Nasution mengeluarkan perintah pemecatan kepada Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Maludin Simbolon. Selain itu, Nasution juga membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dan menempatkannya di bawah perintah langsung Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Reaksi keras dari pemerintah pusat ini ditanggapi kembali oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein dengan proklamas berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Padang. Pecahnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 menempatkan Angkatan Darat sebagai salah satu unsur dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam situasi tersebut, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan ketua gabungan kepala staf, memegang peranan yang sangat penting. Sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat dan koordinator pasukan dari ketiga angkatan perang, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis, mengoordinasikan operasi militer, serta memastikan kesatuan komando dalam menghadapi pemberontakan PRRI. Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution juga memberikan reaksi keras pada pembentukan PRRI, dalam ceramahnya di hadapan 970 orang perwira dari ketiga angkatan perang pada 22 Februari 1958, beliau menyatakan bahwa siapa saja yang mendukung dan menyetujui tindakan golongan PRRI dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari dinas ketentaraan (Rachmat et al, 1992: 96).

Di samping penerapan strategi militer, Nasution juga menjalankan kebijakan yang bersifat politis. Ia membedakan antara pimpinan pemberontakan dengan masyarakat daerah yang pada dasarnya tetap merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, operasi militer diarahkan kepada penghancuran struktur organisasi PRRI tanpa menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran utama. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses pemulihan keamanan setelah wilayah wilayah tersebut berhasil direbut kembali oleh pemerintah pusat. Kebijakan Nasution mencerminkan penerapan prinsip perang terbatas (limited war), yaitu penggunaan kekuatan militer secara terukur sesuai dengan tujuan politik negara. Operasi militer diarahkan untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah pusat dan menjaga keutuhan wilayah tanpa menciptakan konflik berkepanjangan. Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar berkembangnya konsep pertahanan wilayah yang dikembangkan Nasution pada periode berikutnya. Keberhasilan berbagai operasi militer pada

tahun 1958 hingga 1961 menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan Nasution mampu mengintegrasikan aspek kepemimpinan, organisasi, strategi, dan koordinasi antarmatra secara efektif. Daerah-daerah penting seperti Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, dan wilayah strategis lainnya berhasil kembali berada di bawah kendali pemerintah. Melemahnya struktur pemerintahan PRRI membuktikan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berhasil 40 secara militer, tetapi juga mampu mengembalikan stabilitas politik nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Abdul Haris Nasution dalam Penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (1958–1961), dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan puncak dari akumulasi berbagai persoalan politik, ekonomi, dan militer yang berkembang pada masa Demokrasi Liberal. Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama mengenai distribusi pembangunan, pengelolaan keuangan negara, serta semakin kuatnya sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, melahirkan berbagai dewan militer di daerah. Situasi tersebut diperburuk oleh ketidakstabilan politik nasional akibat sering bergantinya kabinet, pecahnya dwitunggal Soekarno-Hatta, serta konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Ketika berbagai tuntutan daerah tidak memperoleh penyelesaian melalui jalur politik, tokoh-tokoh sipil dan militer di Sumatera kemudian memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat. Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Latar belakang kehidupannya yang berasal dari keluarga sederhana di Mandailing, Sumatera Utara, membentuk karakter disiplin, religius, nasionalis, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pendidikan yang ditempuh sejak masa kolonial hingga karier militernya menjadikan Nasution berkembang sebagai perwira profesional sekaligus pemikir militer. Pengalaman memimpin berbagai operasi sejak masa Revolusi Kemerdekaan membentuk kemampuan strategis yang kemudian membawanya menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan 55 Darat (KSAD) dan juga ketua gabungan kepala staf. Selain dikenal sebagai pemimpin militer, Nasution juga memberikan sumbangan pemikiran melalui konsep Perang Rakyat Semesta dan gagasan mengenai fungsi teritorial Angkatan Darat yang menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan nasional Indonesia. Abdul Haris Nasution memegang peranan yang sangat penting dalam penumpasan PRRI. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Gabungan Kepala Staf, Nasution bertanggung jawab merumuskan kebijakan strategis, mengoordinasikan pelaksanaan operasi militer, serta memastikan adanya kesatuan komando dalam menghadapi pemberontakan. Perannya tidak terbatas pada pengambilan keputusan di tingkat pusat, tetapi juga meliputi penyusunan strategi operasi terpadu yang memadukan kekuatan militer, pendekatan teritorial, serta upaya politik dan psikologis. Di bawah arahnya dilaksanakan berbagai operasi militer, seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Saptamarga, dan operasi-operasi lanjutan yang berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai PRRI. Keberhasilan operasi tersebut mempercepat berakhirnya pemberontakan dan mengembalikan kewibawaan pemerintah pusat di wilayah Sumatera. keberhasilan penumpasan PRRI memberikan dampak yang besar terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Dari sisi politik, pemerintah pusat berhasil mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencegah meluasnya gerakan separatis di berbagai daerah. Dari sisi militer, keberhasilan tersebut memperkuat posisi Angkatan Darat dalam kehidupan kenegaraan dan semakin mengukuhkan pengaruh Abdul Haris Nasution sebagai salah satu tokoh utama pembinaan organisasi militer Indonesia. Selain itu, pengalaman penumpasan PRRI menjadi dasar berkembangnya konsep pertahanan nasional yang menempatkan kerja sama antara militer dan masyarakat sebagai

bagian penting dalam menjaga integrasi nasional. Dengan 56 demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menumpas PRRI tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga oleh kemampuan kepemimpinan, koordinasi, serta strategi yang dirancang oleh Abdul Haris Nasution. Perannya sebagai pemimpin militer, perancang strategi, dan pengambil kebijakan menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afini, W. D., Hardiyansyah, M. R., & Azis, A. (2024). Peran Abdul Haris Nasution dalam Perkembangan TNI. *Polyscopia*, 1(1), 11-19.
- Dayani, S.R., Rohayati, Tuti., Sujana, A.M. (2025). Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan Politik Di Awal Orde Lama. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(3). 441- 454.
- Fajri, P. C. (2025). Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi *Parlementer* (1950-1959). *Siyasah*, 5(1), 71-92.
- Lorenca, C. (2024). Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961). *Jurnal Santhet*. 8(1). 1061-1066.
- Malihu, L. (2022). PRRI/Permesta dalam Pandangan Sejarahwan Dr. RZ Leirissa. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 6(2), 152-157.
- Malinau, W., & Yuliantri, R. D. A. (2023). Abdul Haris Nasution's Contributions to Indonesian Military and Politics: 1955-1959. *Diakronika*, 23(2), 184 194.
- Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda. *Paradigma*, 8(2), 174-185.
- Nasution, Abdul Haris. (1981). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1: Kenangan Masa Muda. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, Abdul Haris. (1983). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2: kenangan Masa Gerilya. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, Abdul Haris. (1983). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3: Masa Pancaroba I. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, Abdul Haris. (1984). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4: Masa Pancaroba II. Jakarta: Gunung Agung
- Nasuton, Abdul Haris. (1985). Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Jakarta: Gunung Agung.
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antar pulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29-43.